



b u l e t i n **Bappebti**

Mengabdikan Dengan Integritas



SRG Mobile
Sharing Economy
Ala Bappebti

MKG Pasar Lelang
Kopi Gayo Pertama
di Indonesia

Geliat Kontrak
Multilateral 2015

Bachrul Chairi :
Persempit Gap
Disinformasi

4-7	Berita Utama	
	Geliat Kontrak Multilateral 2015	14-15 Agenda Foto
8-9	Pasar Fisik	16-17 Aktualita
	Aspebtindo Perekat Pelaku PBK	- MKG Pasar Lelang Kopi Gayo Pertama di Indonesia - BKDI Catatkan Volume Transaksi Rp 6,67 triliun - 3 Bank Siap Jadi Pelaku Kontrak Berjangka Syariah - Endang Sutisna; Kode Etik Aspebtindo Milik Industri PBK
10-11	Resi Gudang	18 Analisa
	SRG Mobile, <i>Sharing Economy</i> Ala Bappebti	19 Breaking News
12	Fokus	20 Info
	Bachrul Chairi : Persempit Gap Disinformasi	21 Info SRG
13	Pasar Lelang	
	SRG dan PLK, Optimalkan Pendapatan Petani	

22-24 KomiKita

SRG Kontrol Harga dan Tekan Inflansi



24-25 Kolom

Hedging Syariah Vs Konvensional



Tips 7P

1. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
2. Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
3. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
4. Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
5. Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
6. Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
7. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

26-27 Kiprah

Irawan Tjindana, Antara Trader dan Kuliner



Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab
Sutriyono Edi

Redaktur
Marthin Simanungkalit

Penyunting/ Editor
Taufik KS
Annisa F Wulandari
Vera Hendrias

Fotografer
Apriliyanto
Poppy Juliyanti
Gita Regina

Sekretaris
Katimin

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:

humas.bappebti@kemendag.go.id



Foto : Sutriyono Edi menyerahkan tongkat estafet Kepala Bappebti kepada Bachrul Chairi.

Evaluasi Pakta Integritas Direksi Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif- SPA yang dilaksanakan Bappebti di Bali, pada 16 Februari 2016, lalu, tampak dengan jelas perusahaan pialang berjangka dan pedagang berjangka yang memiliki komitmen kuat dalam memajukan perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Terkait itu, Bappebti pun mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada tiga perusahaan pialang berjangka dan tiga perusahaan pedagang berjangka.

Sedangkan kriteria yang menjadi barometer penilaian Bappebti atas kinerja pelaku industri perdagangan berjangka itu, yakni: peningkatan kontrak berjangka transaksi multilateral, kepatuhan memenuhi persyaratan keuangan, jumlah pengaduan nasabah, dan laporan rutin direktur kepatuhan.

Di samping itu, dari evaluasi itu yang dilakukan tampak share transaksi kontrak berjangka multilateral terhadap transaksi bilateral (SPA) dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tahun 2015, share transaksi kontrak multilateral mencapai 19,43 %, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 sebesar 18,03 %. Dengan kata lain, volume transaksi kontrak berjangka multilateral di tahun 2015 mencapai 1.280.801 lot atau meningkat 15,47 % pada periode yang sama tahun 2014 yakni sebesar 1.109.175 lot.

Sutriyono Edi, yang saat itu masih menjabat Kepala Bappebti, mengatakan, selain evaluasi pencapaian transaksi multilateral, ada beberapa tujuan lain dari kegiatan tersebut. Diantaranya, menyebarluaskan informasi terkini tentang perkembangan industri PBK khususnya untuk transaksi kontrak multilateral; memotivasi kepada direktur utama pialang berjangka bahwa menjual kontrak berjangka secara multilateral juga mampu menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan secara keseluruhan terkait sistem transaksi perdagangan multilateral; merumuskan program atau kegiatan yang mampu

memicu pialang berjangka untuk meningkatkan transaksi kontrak berjangka secara multilateral; memberikan penghargaan (*awards*) kepada pialang berjangka peserta SPA dan pedagang berjangka penyelenggara SPA atas pelaksanaan Pakta Integritas selama periode tahun 2015.

Kini pucuk pimpinan Bappebti di bawah kendali Bachrul Chairi, yang dilantik Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, pada 08 Maret 2016, lalu. Sedangkan Sutriyono Edi, ditunjuk sebagai Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar.

Dalam pernyataan singkatnya kepada Buletin Bappebti, Bachrul Chairi, mengatakan, "apa yang sudah dilakukan para pendahulu saya, sudah di *track* yang benar. Jadi saya tinggal meneruskan saja."

"Tapi menurut saya kuncinya adalah mempersempit gap disinformasi yang ada selama ini. Jika disinformasi itu bisa kita perbaiki, niscaya industri perdagangan berjangka komoditi akan menjadi barometer perdagangan komoditi unggulan kita di dalam negeri," ujarnya.

Namun di sisi lain ditegaskan Bachrul Chairi, "masa pensiun saya kurang lebih sekitar dua tahun lagi. Sebab itu saya ingin menutup karier saya dengan membawa perubahan yang signifikan terhadap industri perdagangan berjangka dan tugas Bappebti lainnya. Karena itu saya mohon kita saling bahu-membahu. Keberhasilan kita bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Energi positif yang diusung Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, tentunya harus ditangkap dan diterjemahkan para stakeholder industri perdagangan berjangka komoditi agar tak lagi 'jago kandang.' Tapi dapat menjadi pemain global, terutamanya di era Masyarakat Ekonomi Asean.

Buletin Bappebti juga tak luput mengucapkan selamat bekerja kepada Sutriyono Edi, di posisi baru sebagai Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar. Tetap semangat!

Tabik!!!



Kepala Bappebti, Sutriono Edi didampingi Kepala Biro Perniagaan, Pantas Lumban Batu, berfoto bersama dengan peraih penghargaan Pakta Integritas dari Bappebti.

Geliat Kontrak Multilateral 2015

Bappebti terus berupaya mendorong pelaku usaha industri PBK untuk meningkatkan transaksi multilateral.

Kerjasama dan sinergitas pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi- PBK mewujudkan fungsi bursa berjangka sebagai sarana lindung nilai- *hedging* dan sarana pembentukan harga- *price discovery* sepanjang tahun 2015 lalu, tampak membuahkan hasil signifikan. Dari data yang dirilis Bappebti, volume perdagangan kontrak berjangka multilateral melonjak 15,47 %, dengan volume transaksi mencapai 1.280.801 lot. Dibandingkan periode yang sama tahun 2014, volume transaksi kontrak multilateral yakni sebesar 1.109.175 lot. Dalam kaitan itu, guna mendorong perkembangan kontrak berjangka multilateral di tahun 2016 dan di masa mendatang, Bappebti menggelar Evaluasi Pakta Integritas Direksi Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif- SPA yang dilaksanakan di Bali, pada 16 Februari 2016. Kepala Bappebti, Sutriono Edi, dalam arahannya mengatakan, latar belakang diselenggarakan acara tersebut,

yaitu untuk melakukan evaluasi atas pencapaian pelaku usaha PBK dalam meningkatkan kontrak berjangka multilateral pasca penandatanganan Pakta Integritas di Jakarta, 14 November 2014 lalu. “Kegiatan kali ini merupakan penyelenggaraan evaluasi yang pertama untuk Tahun Anggaran 2016,” katanya. Dari hasil evaluasi itu, pencapaian transaksi multilateral ternyata tidak mengecewakan. Data Bappebti mencatat, pertumbuhan share transaksi kontrak berjangka secara multilateral terhadap transaksi bilateral (SPA) dari tahun ke tahun terus meningkat. Tercatat pada tahun 2012 sebesar 14,26 %; tahun 2013 sebesar 18,37 %; tahun 2014 sebesar 18,03 %. Demikian juga untuk tahun 2015 yang mencapai 19,43 %. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 (18,03 %), maka terjadi peningkatan share transaksi sebesar 1,40 %. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2015, transaksi PBK mencapai 6.590.530 lot. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 6.153.009 lot, terjadi peningkatan sebesar 7,11 %. Sedangkan untuk transaksi

multilateral di bursa berjangka, telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat dari volume transaksi tahun 2015 mencapai 1.280.801 lot atau meningkat 15,47 % pada periode yang sama tahun 2014 yakni sebesar 1.109.175 lot. Untuk produk yang paling banyak diperdagangkan, diantaranya CPOTR 439.635 lot, Kopi Robusta (RCF) 233.712 lot, Emas 250 gram (GOL250) 129.023 lot. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, kontrak berjangka CPOTR terjadi penurunan volume sebesar 27%, Kontrak Berjangka RCF mengalami peningkatan volume sebesar 64% dan kontrak berjangka GOL 250 meningkat sebesar 271%. Selain evaluasi pencapaian transaksi multilateral, ada beberapa tujuan lain dari kegiatan tersebut, diantaranya, menyebarkan informasi terkini

tentang perkembangan industri PBK khususnya untuk transaksi kontrak multilateral; memotivasi kepada direktur utama pialang berjangka bahwa menjual kontrak berjangka secara multilateral juga mampu menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan secara keseluruhan terkait sistem transaksi perdagangan multilateral; merumuskan program atau kegiatan yang mampu memicu pialang berjangka untuk meningkatkan transaksi kontrak berjangka secara multilateral; memberikan penghargaan (*awards*) kepada pialang berjangka peserta SPA dan pedagang berjangka penyelenggara SPA atas pelaksanaan Pakta Integritas selama periode tahun 2015.

Terbaik
Dalam kaitan evaluasi Pakta Integritas pelaku usaha PBK itu, Bappebti mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada sejumlah perusahaan Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka. Ada pun kriteria yang menjadi barometer penilaian tersebut yakni berdasarkan: peningkatan kontrak berjangka transaksi multilateral, kepatuhan memenuhi persyaratan keuangan, jumlah pengaduan nasabah, dan laporan rutin Direktur Kepatuhan. Dengan berbagai kriteria itu, perusahaan Pialang Berjangka yang meraih Penghargaan Pakta Integritas yakni PT Inter Pan Pasific Futures, PT Starpeak Equity Futures, PT Victory International Futures. Sedangkan dari kelompok Pedagang Berjangka yakni PT Aperdi, PT Capital Megah Mandiri dan PT Prolindo Buana Semesta.📌

Volume Transaksi Multilateral Pialang Berjangka & Pedagang Berjangka JFX

No.	Pialang Berjangka	Kontrak Berjangka	Vol/Lot	Pedagang Berjangka	Vol/Lot
1	PT Inter Pan Pacific Futures	Robusta Coffee Futures	422726	PT Menara Mas Investindo	4250
2	PT Finex Berjangka	Arabica Coffee Futures	54260	PT Menara Mas Investindo	2130
3	PT Garuda Berjangka	Kontrak Berjangka Kakao	36946	PT Menara Mas Investindo	34150
4	PT Agrodana Futures	Kontrak Berjangka Kakao	27946	PT Menara Mas Investindo	34150
5	PT Trijaya Pratama Futures	Olein (20 ton)	12960	PT Capital Megah Mandiri	20878
6	PT Global Artha Futures	Olein (10 ton)	9116	PT Capital Megah Mandiri	13097
7	PT Kresna Investa Futures	Gold (250 gram)	54034	PT APERDI	44194

Sumber: JFX

Volume Transaksi Multilateral Pialang Berjangka & Pedagang Berjangka BKDI

No.	Pialang Berjangka	Kontrak Berjangka	Pedagang Berjangka
1	PT Philip Futures	Palm Complex	PT Golden Tropical
2	PT Monex Investindo Futures	GOLDGR	PT Straits Bullion
3	PT PG Berjangka	UBSG	PT Straits Bullion
4	PT Timah Persero Tbk	Tin	Westin Trade Global, Pte Ltd

Sumber: BKDI

Perkembangan Pasar Fisik Timah BKDI



Sumber: Bappebti



Strategi dan Program Bappebti 2016

Memperkuat kinerja industri perdagangan berjangka komoditi- PBK dimasa-masa mendatang dan khususnya di tahun 2016, Bappebti telah merumuskan sejumlah strategi dan sekaligus target yang bakal dicapai. Terkait itu, Bappebti akan fokus pada tiga sasaran, yaitu peningkatan transaksi multilateral, peningkatan integritas PBK, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri PBK.

Kepala Sutriono Edi, masih dalam rangkaian kegiatan Evaluasi Pakta Integritas Direksi Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif- SPA yang dilaksanakan di Bali pada 16 Februari 2016, lalu, mengatakan, untuk meningkatkan transaksi kontrak multilateral terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan penting diterapkan di masing-masing perusahaan baik perusahaan pialang berjangka maupun pedagang berjangka.

Dari arahan Sutriono Edi, ada enam poin yang bisa dijadikan strategi untuk mencapai tiga fokus yang sudah ditetapkan, yakni; strategi pertama, bahwa para pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi kontrak berjangka transaksi multilateral, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti No. 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar- *market maker*. "Di samping itu, Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Bappebti No. 71/BAPPEBTI/Per/8/2009 dan No. : 85/BAPPEBTI/Per/10/2010," tegas Sutriono Edi.

Strategi kedua, tambahannya, perlunya *leadership* yang kuat dari masing-masing direktur utama pialang berjangka untuk mengawasi karyawan-karyawannya yang bertugas di divisi *desk commodity* agar mereka aktif menawarkan produk-produk multilateral kepada masyarakat.

Ketiga, setiap perusahaan pialang berjangka peserta SPA harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk *desk commodity*. Sehingga dapat berjalan sesuai fungsinya, termasuk menempatkan SDM yang cukup dan memiliki kompetensi, serta memiliki bahan promosi atau melakukan kegiatan promosi terkait transaksi kontrak berjangka secara multilateral.

Salah satu caranya, antara lain membuat brosur, leaflet dan iklan untuk memperkenalkan transaksi multilateral sekaligus melaksanakan kegiatan seminar, pelatihan, atau kompetisi trading tentang transaksi kontrak berjangka multilateral.

Keempat, para wakil pialang berjangka, sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan nasabah, harus lebih mengenal dan memahami transaksi kontrak berjangka multilateral dengan memperdalam pengetahuannya, khususnya dalam hal *product knowledge*, sehingga dapat mengenalkan dan menjelaskan transaksi kontrak berjangka secara multilateral kepada nasabah.

Kelima, bursa berjangka juga harus menggunakan kewenangannya untuk ikut membangun dan melakukan pengawasan terhadap *desk commodity* yang ada di setiap perusahaan yang menjadi anggotanya. Selain itu, memastikan terdapat *desk commodity* di masing-masing perusahaan pialang berjangka yang telah berjalan sesuai dengan fungsinya.

Keenam, sistem trading untuk transaksi kontrak berjangka multilateral yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka Jakarta-BBJ dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI harus terus disosialisasikan kepada pelaku usaha dan terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi.

Sementara itu, menurut Sutriono Edi, untuk evaluasi pelaku usaha yang dilakukan Bappebti terkait integritas keuangan dipengaruhi dari beberapa faktor. Diantaranya, dari tingkat

kepatuhan penyampaian laporan keuangan yang benar dan tepat waktu; kemampuan permodalan baik modal bersih disesuaikan, modal disetor, ekuitas; serta dana nasabah di rekening terpisah.

"Sehingga berdasarkan parameter dimaksud, dapat ditentukan perusahaan pialang berjangka dan pedagang berjangka penyelenggara SPA yang mempunyai dedikasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku," terang Sutriono.

Program 2016

Dalam kegiatan tersebut, Sutriono Edi juga memaparkan program-program yang akan dilakukan oleh Bappebti sepanjang tahun 2016. Diantaranya, mendorong bursa berjangka untuk meluncurkan jenis kontrak-kontrak berjangka baru dengan subjek komoditi unggulan Indonesia yang memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi. Dalam kaitan diversifikasi kontrak berjangka, Bappebti juga mendorong SRO melakukan pengembangan produk kontrak berjangka dengan subjek Resi Gudang dari komoditi unggulan yang terpilih berdasarkan potensi kelayakan.

Di samping itu, volume transaksi diproyeksikan mencapai 7.368.266 Lot atau meningkat sebesar 11,80 % jika dibandingkan dengan volume tahun 2015 sebesar 6.590.530 lot. Volume transaksi kontrak berjangka secara multilateral meningkat menjadi 1.527.564 lot (naik 19,27 %) dan volume transaksi bilateral SPA meningkat menjadi 5.840.702 lot (naik 10 %).

Selain itu, Bappebti juga akan mengoptimalkan pemanfaatan *desk commodity* pialang berjangka baik kantor pusat maupun kantor cabang; penyusunan peraturan yang mendukung pelaksanaan transaksi kontrak berjangka multilateral; meningkatkan pelatihan para wakil pialang berjangka untuk lebih memahami transaksi kontrak berjangka secara multilateral; mengembangkan sistem informasi pengawasan PBK; membangun sistem informasi



Kepala Bappebti, Sutriono Edi menerima Kode Etik Apebtindo dari Ketua Umum Aspebtindo, F. Wishnubroto.

pelanggaran PBK.

Yang tak kalah menarik dari program yang dipaparkan Sutriono Edi, yakni, Bappebti akan mendorong pemerintah untuk pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menggerakkan likuiditas transaksi PBK khususnya transaksi kontrak berjangka secara multilateral. "Bisa saja nantinya pemerintah akan insentif dengan pemberian keringanan pajak atas transaksi multilateral," katanya.

Di sisi lain, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean- MEA yang telah berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015, Sutriono berpesan, agar pelaku usaha PBK mampu memiliki daya saing sehingga para pelaku industri nasional tidak kalah dengan kompetitor yang berasal dari negara Asean lainnya.

"Peningkatan kompetensi dan integritas bagi pelaku usaha mutlak

diperlukan agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan industri ini dapat tumbuh sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya," ucapnya.

Dia juga menambahkan, Bappebti memandang perlu untuk menyusun kurikulum baku untuk profesi-profesi yang terkait dengan industri PBK. Diantaranya, untuk profesi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

"Harapan kita bersama, di pertengahan tahun ini pada semester I Tahun 2016, kontrak-kontrak baru berbasis komoditas primer unggulan ekspor Indonesia dapat diperdagangkan di bursa berjangka, seperti teh, rumput laut, kopra, dan karet serta komoditi syariah," tutup Sutriono Edi.



Aspebtindo Perekat Pelaku PBK

Aspebtindo setelah satu tahun terbentuk, menjadi kekuatan baru diindustri perdagangan berjangka komoditi- PBK Indonesia.

Dua dan harapan terucap mengiringi setahun berdirinya Aspebtindo. Hal itu terlihat dalam perayaan ulang tahun sekaligus rapat anggota tahunan yang pertama bagi Aspebtindo. Acara tersebut digelar di Auditorium Graha Mandiri, 08 Maret 2016 lalu, dan mengundang seluruh pelaku PBK dan tentunya dari anggota, pengurus, pembina maupun dewan pengawas Aspebtindo.

Sutriono Edi, yang saat itu masih menjabat Kepala Bappebti sekaligus Dewan Pembina Aspebtindo, mengatakan, usia Aspebtindo yang telah dibentuk sejak 12 Februari 2015 lalu, tak ubahnya seperti masa keemasan atau *golden age* pada balita. Di masa itu, balita sangat membutuhkan gizi, vitamin dan pendidikan usia dini yang baik. "Kalau salah asuhan, bisa berbahaya," ucapnya.

Begitu pun dengan Aspebtindo, diusianya yang baru menginjak setahun, suntikan dana dan pembekalan etika sangat diperlukan. Karenanya, dibutuhkan kebersamaan untuk membangun asosiasi

tersebut. "Aspebtindo harus mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Selain itu, jika ada hal kurang baik dalam perjalanan Aspebtindo, maka perlu diluruskan. Jadi harus dikritik dan diberi masukan," ujar Sutriono Edi.

Dia juga menyambut baik langkah Aspebtindo menerbitkan Kode Etik Aspebtindo. "Kode etik adalah hal yang sangat penting. Jika moral dan etika dapat dijaga, minimal akan mengurangi kasus atau hal-hal yang kurang baik yang terjadi dalam industri perdagangan berjangka," katanya.

Karena itu, dia sangat berharap agar Aspebtindo bisa mendisiplinkan dan menjaga moral semua anggotanya.

Tak kalah penting, Sutriono juga berpesan agar para pengurus Aspebtindo dapat bekerja secara profesional. Diharapkan, semua pengurus Aspebtindo menanggalkan baju dari perusahaannya masing-masing. Entah itu dari perusahaan pialang ataupun pedagang.

"Jadi, pengurus tidak melihat kepentingannya sendiri, tapi harus

mampu berdiri di tengah-tengah," sebut Sutriono Edi.

Menanggapi hal tersebut, F. Wishnubroto, Ketua Umum Aspebtindo, mengatakan, sejak awal semua pengurus Aspebtindo telah menanggalkan baju dari perusahaannya masing-masing. "Sebagai pengurus, harus satu komitmen untuk mau berkiprah di Aspebtindo," tegasnya.

Meski begitu, dia mengakui, dalam perjalanannya memang bukanlah hal yang mudah. Tapi bagaimana pun juga semua pengurus harus dapat melakukannya. "Hal itu sejatinya sudah dimulai dan sudah kami buktikan sejak berdirinya Aspebtindo," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Aspebtindo, Ardiansyah Parman, berharap agar semua pelaku PBK dapat berkualitas, berintegritas dan juga profesional. Dia berpendapat aturan kode etik yang diterbitkan Aspebtindo sudah tepat untuk membangun etika ataupun akhlak di dalam industri PBK. "Dengan itu, industri ini dapat diterima

dan terhindar dari pandangan negatif."

Dia menambahkan, jika ingin membangun industri PBK, jangan hanya mengukur dengan besar kecilnya nilai transaksi yang berhasil dicapai. Tapi, dia bilang, "kita harus bertanya, seberapa besar pialang memberikan kontribusi positif kepada nasabah? kalau semakin besar, barulah pialang itu dapat disebut hebat." Ardiansyah juga berharap, industri PBK dapat berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Program Aspebtindo

Dari tahun 2015, Aspebtindo telah melakukan berbagai kegiatan. Pertama, menerbitkan kode etik anggota Aspebtindo yang dilengkapi dengan pembentukan komite etik Aspebtindo dalam rangka menjaga kehormatan, martabat, dan integritas anggota Aspebtindo dalam menjalankan kegiatannya.

Kedua, pembuatan website resmi dan leaflet profil Aspebtindo serta pengangkatan Direktur Eksekutif Aspebtindo. Ketiga, menyelenggarakan pelatihan profesi wakil pialang berjangka di Solo pada November 2015 dan di Bandung pada Desember 2015. Selain itu Aspebtindo juga menjadi pembicara pada kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh Bappebti dan institusi lainnya.

Terakhir, ikut berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia ke 30 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di JIEXPO Kemayoran, dari tanggal 21-25 Oktober 2015.

Sedangkan untuk tahun 2016, Ketua Umum Aspebtindo, F. Wishnubroto, mengatakan, pihaknya merencanakan akan melaksanakan berbagai program kegiatan. Diantaranya, sinkronisasi peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kegiatan maupun profesi PBK; melakukan koordinasi secara berkala dengan direktur kepatuhan pialang berjangka; melakukan pendekatan kepada calon anggota

asosiasi untuk menjadi anggota asosiasi, baik secara persuasif maupun refresif.

"Diharapkan semua pihak yang mendapatkan izin usaha, izin, sertifikat pendaftaran, persetujuan, penetapan dari Bappebti, pada tahun 2016 telah menjadi anggota asosiasi," imbuh Wishnu.

Dia menambahkan, Aspebtindo juga akan terus memantau kepatuhan anggota asosiasi dalam melaksanakan kewajiban terhadap asosiasi; melakukan sosialisasi kode etik anggota Aspebtindo kepada anggota Aspebtindo dan pemantauan penerapan kode etik asosiasi; pemutakhiran dan penyempurnaan isi website Aspebtindo dan pembuatan data base pelaku usaha perdagangan berjangka dan sinkronisasi dengan database pelaku usaha perdagangan berjangka yang dimiliki otoritas dan SRO-*self regulatory organization*.

Selain itu, Aspebtindo juga berencana akan menyelenggarakan FGD- *forum group discussion* dalam rangka pengembangan kegiatan PBK; berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi / *workshop* / dialog interaktif / media *sharing* yang diselenggarakan oleh Bappebti dan pihak-pihak lain dalam industri PBK; kunjungan ke redaksi media massa dalam rangka pengenalan Aspebtindo; menggelar pelatihan profesi wakil pialang berjangka dan pelatihan kompetensi calon peserta ujian kompetensi wakil pialang berjangka.

Tak kalah menarik, tahun ini Aspebtindo juga akan mendirikan *futures library* di kantor Sekretariat Aspebtindo untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan mengenai PBK. Selain itu, Aspebtindo akan melakukan peninjauan kerjasama dengan perguruan tinggi/akademi dalam rangka pengembangan kegiatan "*Futures Learning Centre*" di lingkungan perguruan tinggi/akademi atau lembaga pendidikan lainnya dalam rangka penyebaran informasi kegiatan perdagangan berjangka, khususnya kontrak berjangka multilateral.

"Dengan berbagai kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh Aspebtindo,

diharapkan akan memberi pengaruh positif terhadap perkembangan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia," ucap F. Wishnubroto.


Anggota Aspebtindo

Sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Aspebtindo merupakan asosiasi tunggal di industri PBK tanah air. Ketua Umum Aspebtindo, F. Wishnubroto, mengatakan, Aspebtindo bukan hanya sekedar perkumpulan pelaku usaha di bidang PBK, tapi juga diharapkan mampu menjadi jembatan antara regulator dan pelaku usaha. Selain itu, Aspebtindo juga mendukung terbentuknya industri PBK yang berdaya saing dan meningkatkan kepercayaan masyarakat di bidang PBK.

"Aspebtindo juga siap berperan dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN- MEA. Hal tersebut sesuai dengan misi Aspebtindo untuk meningkatkan kinerja PBK yang bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, wajar, transparan serta sesuai praktik industri PBK yang berstandar internasional," papar Wishnu.

"Hingga saat ini sudah ada sekitar 80 % pelaku perdagangan berjangka komoditi yang menjadi anggota Aspebtindo. Jadi tinggal 20 % lagi yang belum menjadi anggota, dan ini menjadi pekerjaan rumah kami selaku pengurus di masa mendatang," terangnya.

Memang dia mengakui, pihaknya tidak dapat memaksa ataupun memberikan sanksi kepada para pelaku usaha PBK yang belum menjadi anggota Aspebtindo. Hanya saja, kata dia, jika tidak menjadi anggota Aspebtindo, maka konsekuensinya adalah tidak mendapatkan pelayanan dari asosiasi, advokasi, atau pun rekomendasi yang diperlukan jika diminta baik oleh SRO maupun Bappebti.

"Karenanya kami selalu memberikan himbauan kepada pelaku usaha PBK untuk menjadi anggota Aspebtindo," tegas F. Wishnubroto. 



SRG Mobile Sharing Economy Ala Bappebti

SRG Mobile inovasi teknologi yang mengintegrasikan rantai industri dari hulu ke hilir.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin massif dewasa ini, menggiring banyak pihak untuk berkeaktivitas dengan menciptakan model-model bisnis yang efisien dan efektif. Dan tak ketinggalan Bappebti pun menjajal fasilitasi model bisnis tersebut, yakni mengintegrasikan antara Sistem Resi Gudang- SRG dan Pasar Lelang Komoditi- PLK melalui *smartphone* berbasis *android*.

Model bisnis inilah yang belakangan populer dikenal dengan konsep *sharing economy*, yang dapat diartikan dengan konsep ekonomi berbagi dalam hal sumber daya baik manusia maupun modal, termasuk ide, produksi, distribusi,

perdagangan dan konsumsi barang dan jasa oleh orang-orang atau organisasi yang berbeda-beda.

Niat Bappebti itu menjadi salah satu pokok pikiran yang diutarakan Kepala Bappebti, Sutriono Edi, dalam Pertemuan Tahunan Pemangku Usaha SRG dan PLK, di Jakarta, pada 10 Februari 2016, lalu. Dalam pertemuan itu, turut dihadirkan berbagai narasumber diantaranya Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Widodo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof. DR. Ir. Rina Oktaviani M.Si., dan Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Ridhwan Ph.D.

Dikatakan Sutriono Edi, menjawab tantangan perdagangan di era digital saat ini, Bappebti telah bersiap meluncurkan SRG Mobile. "Bappebti ingin terus berinovasi, salah satunya akan meluncurkan aplikasi SRG Mobile yang dapat memberikan kemudahan bagi petani dan produsen dalam hal registrasi anggota SRG, melakukan transaksi Resi Gudang, mengakses harga harian komoditi, dan jadwal pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi di berbagai daerah," ujar Sutriono Edi.

Lebih jauh diungkapkan, melalui SRG Mobile itu, nantinya para petani dapat memanfaatkan simulasi penghitungan biaya serta mengajukan penyimpanan

komoditi di gudang SRG dan pembiayaan di bank.

"Untuk lebih sederhananya, SRG Mobile itu mirip seperti GoJek. Awalnya siapa yang sangka bisa sebesar sekarang ini. Apakah tukang ojek bisa mengoperasikan aplikasinya? Ternyata bisa kan? Bahkan, mereka bisa lebih mudah tahu mengenai berbagai informasi," terangnya.

Di sisi lain diilustrasikan Sutriono Edi, SRG rumput laut yang ada di pulau terpencil akan bisa dipasarkan langsung ke pabrika yang ada di hilir. "Jadi dengan SRG Mobile ini akan terkonsolidasi sebagai pola bisnis yang menguntungkan seluruh pihak dari hulu sampai hilir," jelas Sutriono Edi.

Terkait itu, SRG Mobile rencananya akan diluncurkan pada pertengahan 2016, ini. Untuk itu, dalam waktu dekat Bappebti akan melakukan edukasi tentang cara penggunaannya kepada para petani, poktan, UKM, koperasi, BUMN/BUMD, dan akademisi di berbagai daerah di Indonesia.

Menanggapi rencana Bappebti yang akan meluncurkan SRG Mobile, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof. DR. Ir. Rina Oktaviani M.Si., mengatakan, sistem online dalam SRG sangat memungkinkan para produsen memiliki pasar yang lebih luas. "Pasalnya, selama ini perdagangan komoditi yang masuk dalam skema Resi Gudang hanya melayani pembelian langsung didaerahnya."

"Dengan SRG Mobile itu, nantinya petani pun akan mendapatkan data harga terbaru, sehingga dia dapat memilih atau komparasi harga dan kapan akan menjual produknya. Atau sebaliknya, malah petani bisa memutuskan untuk menjual langsung di saat diketahui harga pasar yang lebih bagus. Sehingga tidak mesti masuk ke gudang SRG," terang Rina Oktaviani.

LPPSRG

Pertemuan tahunan pemangku SRG dan PLK yang mengambil tema, "Modernisasi Infrastruktur SRG dan



Ilustrasi SRG Mobile

PLK untuk Ekonomi Kerakyatan di Era Perdagangan Digital" tersebut, Kepala Bappebti, Sutriono Edi, juga menegaskan rencana integrasi PLK dan SRG sebagai arah kebijakan Bappebti di bidang SRG dan PLK di 2016.

Menurutnya, SRG merupakan instrumen yang mereposisi kembali komoditas pertanian sebagai barang yang bernilai ekonomis dan layak digunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari bank maupun lembaga keuangan nonbank. Sedangkan pasar lelang dapat menjadi sarana pemasaran bagi komoditas yang disimpan dalam gudang SRG. Sebaliknya, komoditas yang disimpan di gudang SRG dapat dijadikan sarana penyelesaian fisik (penyerahan komoditas) atas aktivitas jual beli di pasar lelang.


"Integrasi SRG (pembiayaan) dan PLK (pemasaran) dari hulu sampai hilir akan mendekatkan pelaku usaha, khususnya petani dan UKM, kepada pasar," ujarnya.

Integrasi kedua instrumen ini, menurut Sutriono Edi, akan memberikan manfaat besar bagi para pelaku UMKM. Di antaranya, integrasi ini menciptakan efisiensi perdagangan dan peningkatan daya saing, tersedianya referensi harga komoditas bagi pelaku usaha, solusi pembiayaan mudah dan murah, serta

memberi peluang bisnis baru bagi pelaku usaha. Pada 2016, Bappebti akan semakin mengefektifkan sinergitas SRG dan PLK, baik pada tataran kebijakan, aturan, program kegiatan, maupun dukungan teknologi informasi.

Paparan yang disampaikan Sutriono Edi itu seiring dengan diterbitkannya PP No. 1 Tahun 2016, tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang- LPPSRG. Dan dengan terbitnya PP tersebut, Perum Jamkrindo telah ditetapkan sebagai LPPSRG.

Dalam kaitan itu, Bappebti pun akan terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka menyiapkan hal-hal teknis guna penyiapan pelaksanaan penjaminan SRG.

Berdasarkan fungsinya, LPPSRG akan melindungi pemilik resi gudang dan/atau lembaga pembiayaan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan pengelola gudang, sehingga stabilitas dan integritas SRG semakin terjaga. 



Bachrul Chairi : Persempit Gap Disinformasi

Bachrul Chairi setelah melanglang ke berbagai posisi atau jabatan di Kementerian Perdagangan, pada Selasa malam (08/04/2016), resmi dilantik Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, sebagai Kepala Bappebti menggantikan Sutriyono Edi yang ditunjuk sebagai Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar.

Pria kelahiran Jakarta, 02 Mei 1958, ini, sebelum tahun 2000 pernah sebagai staf di Bappebti dan juga berkontribusi mengantar berdirinya bursa berjangka komoditi yang pertama di tanah air.

Meski sudah cukup lama tidak bersentuhan langsung dengan industri perdagangan berjangka komoditi, sentuhannya sudah ditunggu-tunggu mengomandoi para pelaku perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi.

Sebab tiga instrument itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditi ekspor dan penguatan struktur pasar komoditi di dalam negeri. Tentunya diharapkan tiga bidang pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan Bappebti itu, akan bermuara pada program Nawacita yang dicanangkan pemerintah.

Mantan Dirjen Kerjasama Perdagangan International, ini, dikenal piawai memainkan strategi lobi para petinggi dari negara-negara mitra perdagangan internasional. Sebab itu, dengan berbekal pengalaman di bidang lainnya, Bachrul Chairi, diharapkan bisa melobi berbagai pihak untuk kemajuan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air.


"Kita menyadarilikuiditas perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan di bursa berjangka tidak semudah yang dibicarakan atau dituangkan di atas kertas. Perlu kerja keras dari masing-masing pihak terkait," kata Bachrul Chairi, kepada Buletin Bappebti, baru-baru ini.

Sebab itu, tambahnya, apa yang sudah dilakukan para pendahulu saya sebagai Kepala Bappebti, sudah di *track* yang benar. "Jadi saya tinggal meneruskan saja," katanya sembari menebar senyum.

"Tapi menurut saya kuncinya adalah

mempersempit gap disinformasi yang ada selama ini. Jika disinformasi itu bisa kita perbaiki, niscaya industri perdagangan berjangka komoditi akan menjadi barometer perdagangan komoditi unggulan kita di dalam negeri," katanya.

Di sisi lain diungkapkan Bachrul Chairi, selama menjabat sebagai Kepala Bappebti, dia bermaksud membawa perubahan yang signifikan terhadap industri perdagangan berjangka komoditi, dan tugas Bappebti lainnya di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi.

"Masa pensiun saya kurang lebih sekitar dua tahun lagi. Sebab itu saya ingin menutup karier saya dengan membawa perubahan yang signifikan terhadap industri perdagangan berjangka dan tugas Bappebti lainnya. Karena itu saya mohonkan kita saling bahu-membahu. Keberhasilan kita bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang," pungkas Bachrul Chairi. 

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi- PLK di berbagai daerah dimaksudkan untuk menyediakan sarana pemasaran yang efektif dan efisien dalam rangka pembentukan harga yang transparan, fair dan menjadi referensi harga serta peningkatan kualitas komoditas. Di sisi lain, PLK diharapkan dapat membangun dan memperluas jaringan usaha serta menjamin penyerahan komoditas sesuai dengan kebutuhan.

Sebab itu, diharapkan 13 penyelenggara PLK baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi petani produsen dalam memperoleh harga yang transparan dan wajar. Sehingga pendapatan petani dapat meningkatkan dan perekonomian daerah menjadi lebih berkembang.

Demikian antara lain arahan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, disaat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas di Bandung, Jabar, pada 15 Maret 2016.

Selain itu, bimbingan teknis ini juga dihadiri 5 pihak swasta yang telah mendapat persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang, yaitu Koperasi Pegawai Negeri Praja Bali, Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat, Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah, PT Puspa Agro- Jatim, dan Koperasi Puskompas- Sulsel.

"Jika 5 PLK yang sudah direvitalisasi ini berjalan sesuai yang diharapkan, perdagangan komoditi di daerah akan jauh lebih marak dan menguntungkan baik bagi petani maupun Pemda," kata Bachrul Chairi.

Dan kalau itu bisa dicapai, tambahnya, maka daerah lain yang belum ada pasar lelangnya, atau pun yang sudah ada maka dengan sendirinya penyelenggaraan pasar lelang akan berkembang pesat.

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi bersama Staf Ahli Mendag Bidang Pengamanan Pasar, Sutriyono Edi dan didampingi Kepala Biro Pasar Fisik dan



Jasa Bappebti, Retno Rukmawati, dalam kunjungan kerja hari kedua di Bandung, Jabar, 16 Maret 2016, juga melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan Sistem Resi Gudang- SRG wilayah Jabar.

Pertemuan itu membahas mengenai pengembangan SRG khususnya di wilayah Jabar, serta tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama untuk melakukan *pilot project* sinergitas antar lembaga guna mengoptimalkan fungsi SRG sebagai sarana pengendalian inflasi dan mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Hadir dalam pertemuan tersebut Kadis Perindag Prov. Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Jawa Barat, Rosmaya Hadi, Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Soekowardojo, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi W Setijono, Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Indryuwani Asikin N.

Ikon Cianjur


Usai melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan SRG Jabar, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi bersama Staf Ahli Mendag Bidang Pengamanan Pasar, Sutriyono Edi, mengakhiri kunjungannya di gudang SRG

Kab. Cianjur.

Dalam arahnya kepada Kadis Perindag Kab. Cianjur, Imam Haris, Kabid Perdagangan, Dinas Perindag Kab. Cianjur, Judi Adi Nugroho, dan Pengelola Gudang SRG Kab. Cianjur, Koperasi Niaga Mukti, Nana Sukatna, Bahcrul Chairi, mengatakan, "siapa yang tidak kenal dan tidak suka dengan beras pandan wangi Cianjur?"

"Karena itu saya berharap gudang SRG yang ada di Warung Kondang, ini, memiliki ikon yaitu beras beras pandan wangi Cianjur," katanya.

Jika pemasaran beras pandan wangi dapat dilakukan melalui gudang SRG ini, tambahna, harga beras pandan wangi pasti akan mencapai level tertinggi. Sehingga petani pun termotivasi untuk membudidayakannya karena ada jaminan pasar dengan harga yang pantas.

"Harga beras pandan wangi Cianjur memang pantas lebih mahal dibandingkan dengan jenis beras lainnya. Karena jenis beras pandan wangi ini tidak dapat ditemui di daerah lain. Sama halnya seperti kopi Gayo dari Aceh, para penikmat kopi berani membayar dengan harga mahal karena mendapatkan sensasinya," terang Bachrul Chairi. 



Bimtek Penyuluh Lapangan SRG

Bappebti menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan SRG yang diselenggarakan di Jakarta, 29 Maret 2016. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Pembinaan Pasar Lelang dan SRG, Yuli Edi Subagio yang mewakili Kepala Bappebti.

Dalam sambutannya, Yuli Edi menyampaikan, peran penyuluh pertanian sangat besar dalam menyebarluaskan informasi dan membimbing pemanfaatan SRG oleh petani. Pasalnya, penyuluh pertanian dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan petani.

Bimtek tersebut diselenggarakan selama empat hari, dimulai dari Selasa, 29 Maret s.d Jumat, 1 April 2016, dan diikuti oleh perwakilan dari dinas yang membidangi perdagangan serta penyuluh pertanian/kehutanan/perikanan dari 20 daerah. Diantaranya, Kabupaten Pidie, Pasaman Barat, Banyuasin, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Ciamis, Indramayu, Kebumen, Bantul,



Madiun, Malang, Bondowoso, Banyuwangi, Sambas, Tapin, Katingan, Nunukan, Luwu Timur, Palopo dan Wakatobi, dengan total jumlah peserta sebanyak 60 orang.



Sosialisasi SRG di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

Bappebti menyelenggarakan acara Sosialisasi SRG dengan tema "SRG sebagai Penggerak Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Daya Saing Bangsa", yang diselenggarakan di Pendopo Balahendang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Kamis (3/3).

Sekretaris Bappebti, Marthin dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia memiliki tantangan dan peluang untuk dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Peningkatan daya saing bangsa terhadap persaingan global dapat didukung dari level petani. Sistem Resi Gudang dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian daerah.

Sosialisasi diikuti oleh lebih dari 100 orang peserta yang terdiri dari petani, poktan/gapoktan, koperasi, dan penyuluh pertanian dari Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Dengan menggunakan anggaran DAK, pada tahun 2014 telah dibangun 1 (satu) buah Gudang SRG yang berlokasi di Jl. Harapan Mas, Desa Sabah, Kec. Bungur Kab. Tapin.



Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka di Surabaya

Bappebti mengadakan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Komoditi (CWPBK) di Hotel Mercure, Surabaya, 16 -17 Maret 2016. Ujian ini adalah Ujian Profesi Angkatan Pertama di tahun 2016. Sekretaris Bappebti, Marthin didampingi Kepala Bagian Humas dan Kerjasama, Taufik, hadir dalam acara ini untuk memberikan pengarahan kepada peserta ujian sekaligus membuka acara ujian ini.

Ujian Profesi CWPBK diadakan 2 hari dalam 2 tahap; Ujian Tertulis dan Ujian Wawancara. Tahap pertama adalah Ujian Tertulis berlangsung selama 2 jam dan diikuti oleh 95 peserta yang dinyatakan lolos administrasi dari total 150 pendaftar. Peserta ujian yang lolos tahap pertama langsung diumumkan pada malam hari.

Peserta yang lolos ke tahap wawancara berjumlah 39 orang dari total 95 peserta ujian tertulis. Dalam tahap ini setiap peserta diuji pemahaman dasar mengenai peraturan-peraturan



Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Pewawancara adalah para Eselon III Bappebti dari Biro Perniagaan, Biro Hukum, Biro Analisis Pasar, dan Sekretariat. Hasil dari Ujian Profesi CWP akan diumumkan maksimal 30 hari setelah pelaksanaan di website resmi Bappebti.

Bappebti Menerima Kunjuran DPR RI Prov. Riau dan Komisi II DPRD Kab. Inhil

Sekretaris Bappebti, Marthin mewakili Kepala Bappebti didampingi Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Hariyati dan Kepala Biro Analisis Pasar Bappebti, Mardjoko menerima kunjungan kerja dari Anggota DPR RI Perwakilan Provinsi Riau, Intsiawati Ayus dan Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, di Kantor Bappebti, Jakarta, (11/03).

Kunjungan Kerja tersebut dalam rangka mendiskusikan usulan Kelapa (Kopra) sebagai subyek komoditi dalam SRG dan perlunya pembangunan gudang SRG di Kab Indragiri Hilir, mengingat Kabupaten ini memiliki potensi lahan Kelapa seluas 426 Hektar yang menghasilkan 450 ton pertahunnya.





MKG Pasar Lelang Kopi Gayo Pertama di Indonesia

P T Meukat Komuditi Gayo- MKG resmi mendapat persetujuan dari Bappebti sebagai penyelenggara pasar lelang forward (penyerahan kemudian) untuk komoditi kopi Gayo. Keputusan persetujuan itu ditetapkan Bappebti pada tanggal 03 Maret 2016, melalui Keputusan Kepala Bappebti No. 04/Bappebti/Kep-PL/SP/03/2016.

Dirut MKG, Iwanitosan Putra, kepada Buletin Bappebti, disela-sela pertemuan penyelenggara pasar lelang di Bandung, Jabar, Rabu, 14 Maret 2016, lalu, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan Bappebti karena dalam waktu singkat dapat mengeluarkan persetujuan penyelenggaraan pasar lelang kepada MKG.


"Kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mengelola pasar lelang akan membantu peningkatan perdagangan kopi Gayo di dalam negeri. Khususnya di Aceh, akan tercipta pasar kopi Gayo yang terorganisir. Sebab selama ini komoditi kopi hampir 80 % diperdagangkan di luar wilayah Aceh. Jadi banyak pedagang yang membawa kopi-nya ke Medan, lalu di ekspor atau dikirim ke berbagai kota di Pulau Jawa," jelas Iwan.

Lebih jauh dikatakan Iwan, tantangan terberat dalam

implementasi pasar lelang kopi Gayo adalah meyakinkan pembeli bahwa kopi yang diperdagangkan merupakan kopi Speciality Gayo. Itu dikarenakan pasar kopi Gayo di mancanegara sudah memiliki segmen tersendiri.

"Sebab itu, untuk menjamin keaslian kopi Gayo yang akan dilelang, kami akan bekerjasama dengan dua Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang- SRG, yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Karena komoditi kopi yang masuk ke gudang SRG itu sudah memenuhi syarat SNI dan merupakan produksi petani dari sekitar Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang menjadi dikenal dengan kopi Gayo," jelas Iwan.

Menurut Iwan, pelaksanaan perdana pasar lelang kopi akan diselenggarakan pasca idul fitri 2016. Karena pertimbangannya puncak musim panen raya kopi akan berakhir pada bulan Agustus 2016, mendatang. Jadi besar kemungkinan persediaan kopi akan cukup banyak di tangan petani.

"Kalau persiapan pelaksanaan pasar lelang hingga saat ini sudah mencapai sekitar 80 %. Jadi sambil menunggu lelang perdana, kami akan lakukan promosi dan pendekatan dengan berbagai pihak," imbuhnya. 

BKDI Catat Volume Transaksi Rp 6,67 triliun


B ursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI mencatatkan kenaikan volume transaksi multilateral pada Februari sebesar 60.474 lot dibandingkan Januari sejumlah 49.887 lot. Dalam keterangan BKDI kepada media, 10 Maret 2016, jumlah total transaksi multilateral Januari mencapai Rp 3,141 triliun atau US\$ 58,525 juta dan Februari senilai Rp 3,613 triliun atau US\$ 68,171 juta. Sehingga total keduanya mencapai Rp 6,676 triliun.

Namun, kumulatif transaksi multilateral BKDI pada dua bulan pertama 2016 sebesar 110.361 lot menurun 14 % dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 126.014 lot.

Minyak sawit yang terdiri dari CPO dan olein mendominasi transaksi dalam dua bulan pertama sebesar 65.004 lot dengan nilai Rp 5,203 triliun. Di posisi kedua, emas mengantongi 28.132 lot dengan nilai Rp 1,473 triliun atau US\$ 7,182 juta.

Sebelumnya, Bappebti menyatakan membidik volume transaksi multilateral pada 2016 meningkat sekitar 15 % dari tahun sebelumnya. Target ini terbilang konservatif karena menyesuaikan dengan harga komoditas yang cenderung berada di posisi rendah.




Sepanjang 2015, transaksi perdagangan berjangka komoditi atau PBK mencapai 6.590.530 lot atau meningkat 7,11 % dari tahun sebelumnya sebanyak 6.153.009 lot. Volume transaksi multilateral 2015 juga naik 15,47 % dari periode sebelumnya sebesar 1.109.175 lot menjadi 1.280.801 lot. 

3 Bank Siap Jadi Pelaku Kontrak Berjangka Syariah



J akarta Futures Exchange- JFX telah siap bekerjasama dan berkomitmen dengan perbankan syariah dalam perdagangan komoditi berjangka syariah. Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang, dalam keterangannya, mengatakan, saat ini telah ada tiga bank syariah yang intensif dilakukan pendekatan yakni, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

"Saat ini kami sedang fokus menyosialisasikan produk syariah kepada para pelaku. Selain itu, aktif berkonsultasi dengan DSN-Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia- MUI, terkait pengenaan tarif pajak kontrak berjangka syariah. Jadi tinggal teknis perpajakannya saja dari MUI," jelas Paulus. Lebih jauh dijelaskan Paulus, saat ini JFX sudah mendapatkan fatwa halal dari DSN MUI untuk produk komoditas syariah. Karena itu, pihaknya optimis kontrak berjangka syariah bakal tuntas semester I tahun ini. "Rencananya, komoditi yang bakal menjadi underlying produk syariah adalah bahan tambang seperti batubara dan emas serta produk perkebunan seperti crude palm oil- CPO, kacang mede, coklat dan kopi," ucap Paulus.

Menurut Paulus, peraturan perdagangan kontrak berjangka syariah akan mengikuti kaidah-kaidah syariah. Diantaranya, secara fisik komoditi yang diperdagangkan harus sudah tersedia. "Meski demikian, nasabah bisa memilih dua opsi dalam perdagangan kontrak berjangka syariah, yaitu dapat memindahtangankan komoditas fisiknya atau melakukan settlement dengan cara lain," terang Stephanus Paulus Lumintang. 

Endang Sutisna; Kode Etik Aspebtindo Milik Industri PBK

A sosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo akhirnya merampungkan juga Kode Etik-nya sebelum genap berusia satu tahun pada 03 Februari 2016, lalu. Berdasarkan akta notaris, asosiasi ini berdiri pada 12 Februari 2015 pasca terpilihnya susunan pengurus inti Aspebtindo 2015-2020.


"Kode etik ini 'kan merupakan amanah dari undang-undang di bidang perdagangan berjangka komoditi dan peraturan dibawahnya. Meski belum bisa dikatakan sempurna, tetapi paling tidak kode etik ini sudah mengakomodasi semua pelaku yang ada di indsutri ini," demikian dikatakan Wakil Ketua II Bidang Hukum, Keanggotaan dan Etika, Aspebtindo, Endang Sutisna, kepada Buletin Bappebti, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini di Jakarta.

Lebih jauh dikatakan Endang Sutisna, kode etik itu tidak seperti kode etik profesi yang lain. Seperti diketahui, di industri perdagangan berjangka komoditi ini 'kan cukup banyak profesi yang terlibat. "Karena itu, kode etik ini mengatur masing-masing

pihak yang ada," katanya.

"Jadi, di Kode Etik Aspebtindo, ini, ada sebanyak 12 profesi yang diatur. Yakni, setiap pihak yang memperoleh izin dari Bappebti dan tunduk pada Undang-undang No. 32 Tahun 1997," katanya

Mengapa hal itu dipisahkan? Tanya Margin Indonesia. "Karena perilaku bursa berjangka pasti akan berbeda dengan perusahaan pialang berjangka. Begitu juga antara lembaga kliring dengan bank margin, dan demikian seterusnya," jawab Endang.

"Tetapi kami cukup meyakini lahirnya Kode Etik Aspebtindo, ini, bisa meningkatkan image dan integritas industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Tapi syaratnya, semua pelaku benar-benar menjunjung tinggi dan menghormati kode etik yang ada. Dan di samping itu tentunya, tunduk pada ketentuan dan peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi," tandas Endang Sutisna. 



Pemerintah Susun Program Atasi Masalah Karet

Pemerintah telah menyusun solusi untuk mengurai permasalahan produksi dan harga karet yang rendah akhir-akhir ini. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, menyampaikan, ada beberapa solusi yang diberikan.

Pertama, membuka pasar karet dalam negeri yang akan diserap oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BUMN dan Kementerian Perindustrian dengan total 500 ribu ton.

Kedua, melakukan peremajaan (*replanting*) karet pada lahan 1 juta ha melalui bantuan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani. Ketiga, memberikan bantuan benih jagung gratis.

"Peremajaan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri sehingga meningkatkan penawaran dan merubah harga karet di tingkat dunia," terang Mentan, belum lama ini.

Pada program peremajaan ini, jelasnya, akan dilakukan sistem tumpang sari antara tanaman karet dengan jagung dan kedelai. Kementerian Pertanian juga akan memberikan bantuan gratis untuk benih jagung dan kedelai tersebut. "Program tumpang sari ini tentu diharapkan akan ada tanaman sela yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Amran Sulaiman.

Di sisi lain, untuk mendongkrak harga karet, Indonesia bersama negara-negara yang telah bergabung dengan International Tripartite Rubber Council-ITRC yakni Thailand dan Malaysia juga memutuskan untuk mengurangi ekspor karet sebesar 615 ribu ton mulai 1 Maret-31 Agustus 2016. Selain tiga negara tersebut, Vietnam juga setuju untuk ikut serta memangkas volume ekspor karetnya.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah, mengatakan, dengan bergabungnya Vietnam, pengurangan ekspor bisa bertambah sekitar 85 ribu ton. Dengan begitu, harga karet oleh ITRC semakin kuat.

"Empat negara tersebut menguasai hampir 85 % produksi karet alam dunia. Dengan pengurangan volume ekspor, maka pasar akan merespon dengan menaikkan harga," jelas Edy Irwansyah.📌

Harga Kopi Masuki Tren *Bullish*

Harga kopi sepanjang tahun 2016 diperkirakan mengalami tren *bullish*. Hal itu dipicu menyusutnya produksi tanaman di wilayah Amerika Selatan dan Asia Tenggara, serta naiknya tingkat permintaan.

Permintaan kopi di seluruh dunia akan melebihi pasokan sebanyak 4 juta kantong pada musim yang dimulai 1 Oktober mendatang. Pada periode sebelumnya, defisit mencapai 4,8 juta kantong. Perkiraan kapasitas 1 kantong sama dengan 132 pon atau 60 kilogram.

Bank Dunia memprediksi harga kopi arabika mencapai US\$ 3.40 per kg pada 2016, terus meningkat tipis sampai 2020 sebesar US\$ 3,44 per kg. Adapun kopi robusta tahun ini diprediksi menuju level US\$ 1,80 per kg dan US\$ 1,84 per kg pada tahun 2020. Bank Dunia juga mencatat tingkat produksi kopi global pada musim 2015-2016 ialah sebanyak 150.122 kantong. Sedangkan tingkat konsumsi berjumlah 148.267 kantong. Pada periode tersebut, Brasil menjadi produsen terbesar dengan kontribusi 49.400 kantong. Sedangkan Indonesia berada di peringkat empat dunia dengan produksi sebanyak 10.605 kantong.

Dari sisi permintaan, Uni Eropa menjadi konsumen terbesar dengan penyerapan 43.850 kantong. Di peringkat kedua, Amerika Serikat mengambil 24.067 kantong, dan Brasil di posisi ketiga sejumlah 20.330 kantong.📌

Commodity futures trading industry to play an important role in supporting the real sector

Commodity futures trading industry is one of the infrastructures required for economic continuity of a country.

That was one of the key points that was addressed by Dr Hendri Saparini, an economist and also a member of National Economic and Industry committee (KEIN) on a recent event lately. "However considering the current administration's focus focus to support real sector, commodity futures trading industry will be an important sector," She said.

"It's because this industry provides risk management mechanism such as price discovery and hedging that were that were needed by real sector," Hendri Saparini explained.

In addition, Hendri Saparini also said that this commodity futures trading industry will be one of KEIN suggestions to president. The reason is because whoever the president is, he or she will not likely able to comprehend all the key instruments to support the real sector.

"The president has instructed all ministers including KEIN to support the growth of the real sector. This will be one of my important suggestions to President Jokowi," She explained.

Because of those reasons, the futures industry may manage the risks that will be faced by the real sector, She added. "In my opinion, players on state-owned enterprises need to join and has active roles in this industry."

"However until today, there are still so many rules and regulations that could burden state-owned enterprises once they are exposed to failure or risks is failure or risk. State-owned enterprises do not want to be the one responsible for such failure. Therefore, we will try to synchronize policy so that state-owned enterprises in the future able to implement risk management in this industry," Hendri Saparini emphasized.📌

SRG guarantee was targeted in May 2016

Perum Jamkrindo, has targeted the execution of SRG guarantee to be done in the coming May 2016.

Government has appointed *Perum Jamkrindo* as the execution institution for SRG guarantee. Through this guarantee, it is hoped that either owner or warehouse management and commodity owner will be more assured on the safety of the goods that are stored in the warehouses.

"*Jamkrindo* has been appointed as the SRG guarantee institution. Currently we are still in the preparation stage. I really hope that SRG guarantee can be commenced on this May," *Jamkrindo President Director*, Diding S.Anwar said to the press in Jakarta on 16th of May 2016.

The preparations that have been done are including management system, technology & information system, and also coordination with *Bthe State Minister for State Owned Enterprises and the Ministry of Trade* in regards to technical guidance.

Once the SRG guarantee is established, according to Diding, at least there will be 120 warehouses that will be managed with SRG guarantee system. For the beginning, the required fund for SRG guarantee is 700 billion rupiahs. The variety of commodities that are included in SRG warehouse are rice and unhulled rice, corn, coffee, cocoa, pepper, rubber, salt, seaweed and also rattan.

The policy on implementing institution for SRG guarantee has been regulated on Government Law No.01 Year 2016 in regards to implementing institution for SRG guarantee, established on 7th of January 2016. According to the Law, *Perum Jamkrindo* was appointed as the managing institution. Warehouse receipt is a document proof of ownership on products that were stored in the warehouse that is issued by warehouse management.📌

Ekspor Kakao RI Diramal Naik

Asosiasi Industri Kakao Indonesia- AIKI memperkirakan volume ekspor komoditas kakao Indonesia untuk tahun 2016, ini, tumbuh sebesar 6,12 % menjadi 346.811 ton. Menurut Direktur Eksekutif AIKI, Sindra Wijaya, hal ini disebabkan oleh utilitas pabrik pasca investasi besar-besaran pada tahun 2015 lalu.

"Tahun lalu industri kakao melakukan investasi pabrik besar-besaran, mengingat banyak kebun kakao yang sudah berumur tua. Dari investasi tersebut, berdampak pada kapasitas produksi terpasang mencapai 800.000 ton per tahun," ujar Sindra.

Sementara itu, tingkat utilitas pabrik belum maksimal baru mencapai 50 % dari 20 pabrik yang beroperasi sehingga kapasitas produksi terpakai hanya 400.000 ton. Diharapkan pada tahun ini seluruh pabrik sudah dapat memaksimalkan utilitasnya demi menggenjot kinerja ekspor kakao lebih baik lagi.

"Pelaku usaha pasti berusaha untuk meningkatkan utilitas pabriknya, dari tahun lalu sebesar 50 % diharapkan tahun ini bisa menjadi 60 %. Perlahan-lahan utilitas dapat meningkat untuk genjot ekspor kakao lebih banyak lagi ke depannya," katanya.

Lebih detail, dia menerangkan, ekspor produk *cocoa cake* diproyeksikan tumbuh 82,51 % menjadi 106.155 ton, mentega kakao 26,66 % menjadi 126.001 ton, bubuk kakao 12,06 % menjadi 61.888 ton, biji kakao turun 60,53 % jadi 25.000 ton, dan *cocoa liquor* turun 1,16 % jadi 27.765 ton.

Berdasarkan data AIKI, sepanjang tahun lalu ekspor kakao mencapai 326.815 ton tumbuh 7,4 % dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun produk yang paling banyak di ekspor adalah mentega kakao sebesar 114.547 ton, *cocoa cake* 88.462 ton, bubuk kakao 58.941 ton, biji kakao 39.622 ton, dan *cocoa liquor* 25.241 ton.📌

Well improved performance, Tin price stuck

Tin physical market that is organized by the Indonesia Commodity and Derivatives Exchange -ICDX since last 30th of August 2013 has reinforced Indonesian position as a production country and also the world tin market leader. It is proven by the total tin transaction that has been increased until the end of 2015.

ICDX's official data that was obtained by Buletin Bappebti records tin transaction volume in 2015 for 13.496 lots. This amount increased for about 19% from tin transaction in 2014 that only reached for 11.373 lots.

With the tin physical market transaction volume for 13.496 lots, total export of pure tin bars was recorded on 67.480 tons, or 99.63% from the total tin transaction in ICDX. The tin physical market transaction that are produced from 31 smelters and 25 buyers of ICDX's members.

On the other hand for pure tin bars marketed domestically has recorded 245,82 tons or 0.37% from ICDX total of tin transaction. The trading volume of ICDX pure tin bars for this local market is quite small as this was launched only in 29th of July 2015.

ICDX *Head of Business Development*, Stella Novita Lukman, on her explanation said that in 2015 there were 11 destined export country recorded. They are Singapore, Holland, Japan, USA, Korea, India, Taiwan, Italia, China, Spain and Malaysia.

In addition Stella said that tin price trend since 2015 has experienced quite significant deflation. ICDX has recorded that tin price trend in 2015 approximately below US\$ level 16.295 per tons, while in 2014 were at US\$ 22.224 per ton.

"Therefore, tin price depreciation in 2015 has reached for US\$ 5.929 per ton," Stella N. Lukman said.📌



Riyanto Siregar
08598736xxxx

Tanya;
Kepada Yth. Bappebti;
Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa FEB di salah satu Perguruan Tinggi di Sumut. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel tentang perdagangan berjangka komoditi, dan di artikel tersebut terdapat kalimat perdagangan berjangka multilateral dan bilateral.
Terkait itu, saya mohon diberi pengertian apa yang dimaksud dengan perdagangan berjangka multilateral dan bilateral.

Jawaban:
Sebelumnya atas nama Bappebti mengucapkan terima kasih karena anda sebagai mahasiswa FEB telah tertarik mengikuti perdagangan berjangka komoditi.
Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2011, tentang perubahan UU No. 32 Tahun 1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, dijelaskan bahwa perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan oleh bursa berjangka terdapat dua jenis yakni perdagangan berjangka multilateral dan bilateral. Yang dimaksud dengan perdagangan berjangka multilateral adalah perdagangan berjangka yang dilakukan oleh banyak pembeli dan penjual anggota bursa berjangka terhadap sebuah subjek atau kontrak berjangka berbasis komoditi (pertanian, perkebunan, tambang, keuangan, dsb).
Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan berjangka bilateral adalah perdagangan berjangka yang dilakukan antara perusahaan pialang berjangka yang menerima amanat dari nasabah dengan perusahaan pedagang berjangka (penyelenggara) terhadap subjek kontrak berjangka komoditi (valuta asing, emas, indeks, dsb).
Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

1. Commercial Grain Stocks
Domestic grain in store in public and private elevators at important markets and grain afloat in vessels or barges in harbors of lakes and seaboard ports.
2. Commercial Paper
Short-term promissory notes issued in bearer form by large corporations, with maturities ranging from 5 to 270 days. Since the notes are unsecured, large corporations with impeccable credit ratings generally dominate the commercial paper market.
3. Commission
The charge made by a commission house for buying and selling commodities.
4. Commission Fee
A fee charged by a broker for executing a transaction. Also referred to as brokerage fee.
5. Commitment
A trader is said to have a “commitment” when he assumes the obligation to accept or make delivery on a futures contract.
6. Commitments
See Open Interest.
7. Commodity Credit Corporation
A government-owned corporation established in 1933 to assist American agriculture. Major operations include price support programs, foreign sales, and export credit programs for agricultural commodities.
8. Commodity Exchange Authority
A regulatory agency of the U.S. Department of Agriculture established to administer the Commodity Exchange Act prior to 1975; the forerunner of the Commodity Futures Trading Commission.
9. Commodity Exchange Commission
A commission consisting of the Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, and the Attorney General, charged with responsibility for administering the Commodity Exchange Act prior to 1975.
10. Commodity Fund
An investment pool, observed as a limited partnership, formed to speculate in commodity futures and options. Participants (investors) will have their original investment increased or reduced by their proportional share of income and trading profits or expenses and trading losses.



REKAPITULASI RESI GUDANG TAHUNAN

TAHUN	PENERBITAN						PEMBIAYAAN				
	Resi Gudang		Komoditi								
	Jumlah	% *)	Volume (ton)	% *)	Nilai Barang	% *)	Jumlah RG	% *)	Nilai	% *)	Lembaga Keuangan
2008	16		508,83		Rp1.431.616.200		6		Rp313.900.000		BPRS Bina Amanah, BRI, Bank Jatim
2009	13	-19%	214,11	-58%	Rp552.962.240	-61%	5	83%	Rp136.800.000	44%	BRI
2010	57	338%	2.299,94	974%	Rp8.678.733.500	1469%	35	600%	Rp4.216.023.850	2982%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, LPDB
2011	271	375%	8.895,62	287%	Rp40.067.723.608	362%	218	523%	Rp24.049.719.530	470%	LPDB, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, BRI
2012	379	40%	18.144,16	104%	Rp93.183.187.979	133%	334	53%	Rp58.653.918.633	144%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, PKBL KBI, Bank Jateng
2013	532	40%	20.796,23	15%	Rp108.948.556.100	17%	446	34%	Rp66.993.206.000	14%	BRI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BJB, PKBL KBI
2014	605	14%	21.649,27	4%	Rp116.514.391.200	7%	559	25%	Rp75.795.102.000	13%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI
2015	300	-50%	8.931,92	-59%	Rp81.171.788.490	-30%	207	-63%	Rp45.562.784.680	-40%	Bank BJB, BRI, Bank Jateng, Bank Lampung, PKBL KBI
TOTAL	2173		81.440,08		Rp450.548.959.317		1810		Rp275.721.454.693		

*) Presentase pertumbuhan pada bulan berjalan tahun sebelumnya
**) Sampai dengan laporan ini dibuat

BAPPEBTI

SRG Kontrol Harga dan Tekan Inflasi

Hai, Bee!!! Bagaimana kabarmu???

Tentu sehat, Peb!!! Bagaimana kabar di rumah???
Tugasku pun, lancar-lancar saja, Peb!!!

Semua sehat dan aman-aman saja, kok. Tapi, aku kangen kamu loh Bee,,,

Nak Bee, lagi ngapain? Saya mau ke gudang SRG.
Mau konsultasi dulu dengan petugas yang ada di sana.

Wah,,, saya ikutan dengan pak Tono, ya???

Peb, nanti saya telepon balik ya!!! Saya mau berkunjung ke gudang SRG dengan pak Tono.

Mari, Nak. Kita berjalan kaki saja ya.

Tentu lebih baik pak berjalan kaki.
Sekalian bisa menikmati suasana desa yang asri.

Nak, bapak boleh tanya kan?
Manfaat SRG selain yang sudah dijelaskan, apa lagi???

Bagi pemerintah, dengan adanya SRG dapat mengontrol persediaan komoditi pangan yang ada di gudang. Dengan begitu, harga komoditi pangan di tingkat konsumen juga bisa dikontrol, dan tidak memicu tingginya inflasi.

Memangnya nak, kalau inflasi tinggi apa ruginya???

Begitu ya??? Jadi, pantas lah ya Nak, petani sulit untuk berkembang.

Hah!!! Lha, benar itu Nak!!!

Wah,,, panjang ceritanya pak!!! Tapi yang jelas akan berdampak ke sektor lain. Harga-harga barang akan menjadi tinggi dan berdampak pada daya beli masyarakat yang menjadi kecil.

Makanya pak, yang banyak menikmati jerih payah para petani itu adalah tengkulak atau ijon. Karena di saat musim panen mereka membeli gabah dengan harga paling murah dan kemudian menjualnya di saat harga tinggi.

Nah, kita sudah mau sampai di gudang SRG.
Nanti kita sambung lagi ya nak, cerita-ceritanya.

Sipp, Pak!!!



Hedging Syariah Vs Konvensional

Terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah 24 Februari 2016, memberikan angin segar bagi dunia keuangan nasional. Saat ini kebutuhan untuk hedging cukup besar dengan tingginya *market uncertainty*, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global. Selama ini ada keengganan mengatur tentang *hedging* atau lindung nilai karena sudah terasosiasi dengan spekulasi. Padahal lindung nilai dan spekulasi adalah dua hal yang berbeda, walaupun kadangkala seiring dan sejalan. Lindung nilai sangat bergantung dengan pembentukan harga di pasar fisik (*spot*), dengan demikian transaksi lindung nilai harus memiliki *underlying* transaksi. Tanpa adanya *underlying* transaksi, maka

aktivitas tersebut cenderung spekulatif.

Dalam sistem perekonomian syariah lindung nilai dibatasi hanya untuk transaksi *forward*, meskipun sebenarnya terdapat instrumen *futures* dan opsi. Transaksi *futures* dan opsi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah haram. Sedangkan transaksi *forward* menurut fatwa tersebut hanya boleh dilakukan untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*). Lingkup dalam transaksi *forward* tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Fatwa DSN Nomor 96/MUI/III/2015, tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami atau Islamic Hedging*). Bank Indonesia dalam hal ini memfasilitasi dengan baik ketentuan ini dan menuangkannya dalam

aturan yang lebih teknis sesuai tugas dan fungsinya.

Kebutuhan untuk transaksi lindung nilai dalam sistem ekonomi syariah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan transaksi lindung nilai konvensional lainnya. Ekonomi syariah yang selama ini dikenal lebih *prudent* tentu dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan transaksi *hedging* konvensional. Di Indonesia saat ini, *hedging* sering kali dikonotasikan dengan hal yang berbau spekulatif. Padahal menengok Pasal 6 UU Perdagangan Berjangka Komoditi No 32 Tahun 1997 beserta perubahannya, tujuan ekonomi dari Perdagangan Berjangka adalah sebagai sarana lindung nilai dan tempat

pembentukan harga yang efektif dan transparan.

Mengapa *hedging* selalu disandingkan dengan spekulasi? Hal ini karena sebagian instrumen *hedging* yang sering digunakan adalah dalam bentuk derivatif yaitu *futures* dan opsi. Dalam perdagangan derivatif, transaksi dimungkinkan hanya dengan membayar sebagian kecil dari nilai pokok transaksi (margin derivatif). Pembayaran di awal dengan nilai yang sangat kecil tersebut dimaksudkan karena transaksi derivatif hanya dimaksudkan sebagai sarana manajemen risiko bukan untuk transaksi jual beli. Namun dengan adanya inovasi dari para pelaku pasar, kesempatan ini digunakann untuk melakukan spekulasi. Dengan modal sedikit mendapatkan keuntungan yang besar (*high risk high return*). Meskipun di samping keuntungan yang besar tersebut tentu saja diikuti juga dengan risiko kerugian yang besar.

Jika dalam suatu sarana perdagangan derivatif atau (dikenal dengan istilah bursa) memberikan peluang untuk kegiatan spekulasi, maka tujuan ekonomi untuk melakukan lindung nilai jadi kurang terlihat. Kondisi serupa ini hanya terjadi jika perdagangan di bursa tidak likuid, namun jika perdagangan di bursa menjadi likuid maka kecil kemungkinan peran spekulator menjadi dominan. Kegiatan spekulasi juga akan semakin terlihat pada perdagangan derivatif yang dilakukan secara *over the counter*- OTC, apabila pengawasan dan audit terhadap sistem perdagangan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Persepsi inilah yang mengakibatkan lambannya perkembangan instrumen yang bisa digunakan para pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai di Indonesia saat ini. Lindung nilai seringkali dipersepsikan dengan kegiatan yang bersifat spekulatif. Padahal lindung nilai tidak hanya dapat dilakukan melalui instrumen derivatif yang rentan dengan aksi spekulasi. Lindung nilai juga dapat dilakukan melalui pasar fisik atau dikenal dengan *forward agreement*.

Dalam sistem perekonomian syariah lindung nilai dibatasi hanya untuk transaksi forward, meskipun sebenarnya terdapat instrumen futures dan opsi

Dalam perdagangan *forward*, barang yang ditransaksikan harus memiliki *underlying*. Dengan demikian tidak diperkenankan pembayaran sebagian (margin). Hal inilah yang menjadi alasan mengapa transaksi lindung nilai dalam konsep ekonomi syariah hanya memperkenankan instrumen *forward*.

Menurut prinsip syariah, transaksi jual beli dikatakan sah jika penjual sudah menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Di samping itu instrumen *futures* dan opsi tidak diperbolehkan karena mengandung unsur maisir (spekulasi), karena harga pada saat pemenuhan kewajiban (serah terima) tidak ditentukan pada saat perjanjian awal dilakukan.

Kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang memperbolehkan lindung nilai valuta asing saat ini cukup tepat, mengingat besarnya kebutuhan untuk *hedging* valas. Dengan menggunakan skema *forward agreement*, kebijakan ini dapat mengedukasi masyarakat bahwa *hedging* bukanlah semata-mata spekulasi. Di samping itu skema *forward* memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan skema *futures* dan opsi. Skema *forward* tepat dipilih sebagai tahapan awal penggunaan instrumen lindung nilai sebelum menggunakan instrumen lainnya yang jauh lebih kompleks.

Bukan hanya berhenti sampai di situ, hendaknya otoritas di bidang keuangan lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan-OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan instrumen lindung nilai untuk produk lainnya. Fluktuasi harga yang cukup signifikan dewasa ini tentu membutuhkan instrumen *hedging* yang lebih variatif. Sekali lagi bukan untuk tujuan spekulasi, melainkan lebih mengedepankan prinsip kepastian dalam berusaha. Yang dimaksud di sini bukan kepastian harga namun lebih pada kepastian dalam mengelola risiko.

Lindung nilai dibutuhkan juga dalam produk keuangan seperti pada transaksi obligasi, khususnya obligasi pemerintah, perdagangan komoditi maupun energi. Bahkan Dewan Syariah Nasional sudah memperbolehkan perdagangan komoditi syariah yang disebut dengan istilah *sil'ah* (*Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*). Dengan menyediakan sarana yang baik dan pengawasan yang tepat, penggunaan transaksi lindung nilai dipastikan akan memberikan kontribusi besar dalam perekonomian kita. Sebagai contoh instrumen *hedging* pada komoditi pangan dan energi akan mendukung program ketahanan pangan dan energi yang dicanangkan pemerintah.

Dengan efektifnya pengelolaan terhadap fluktuasi harga tersebut, harga di tingkat *end-user* akan cenderung stabil sehingga dapat menekan inflasi. Fluktuasi harga diharapkan hanya mempengaruhi level pedagang besar yang dinilai sudah mampu mengantisipasi risiko tersebut dengan baik. Kita dapat melihat kontribusi aktivitas *hedging* di negara maju, di mana mereka dapat menekan inflasi dengan baik. Dengan inflasi yang terkendali, maka tingkat suku bunga pinjaman dapat ditekan sekecil mungkin. Kondisi ini tentunya akan memudahkan pencapaian target keuangan, baik oleh pemerintah maupun swasta. (*) Nurlisa Arfani

Widyaiswara, Pusdiklat Kementerian Perdagangan



Irawan Tjindana

Antara Trader dan Kuliner

Rasa dahaga akan ilmu perdagangan berjangka komoditi-PBK seakan tak pernah terpuaskan dari sosok Irawan Tjindana. Satu mimpinya yang belum kesampaian, ia ingin menyerap ilmu PBK di luar negeri, meski tak jadi soal hanya sebatas karyawan magang.

Sudah cukup lama Irawan Tjindana atau biasa disapa Irawan berjibaku di industri PBK. Dia terjun ke industri sejak tahun 2002 silam. Tercatat, pada tahun 2004, dia telah mendapatkan izin sebagai Wakil Pialang di sebuah perusahaan Pialang Berjangka. Tapi di tahun 2009, Irawan justru keluar dari perusahaan tersebut dan memilih menjadi *trader*.

Berkat pengalaman sebagai *trader*, Irawan Tjindana pernah diganjar penghargaan sebagai *trader* terbaik untuk transaksi *crude palm oil*- CPO dari

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia-BKDI. Dan juga untuk kontrak kakao yang diperdagangkan Jakarta Futures Exchange- JFX.

Di tahun 2010, bertepatan dengan berdirinya PT Harta International Investama- HII, dia ikut bergabung di perusahaan Pedagang Berjangka tersebut. Dia pun dipercaya duduk di salah satu kursi direksi. Tapi perkembangan PT HII tak semulus yang dibayangkan. Ada saja batu kerikil yang mengganjal dalam perjalanannya.

"PT HII beberapa kali ganti pemilik saham mayoritas, sehingga kebijakannya pun berubah-ubah. Namun tetap berkomitmen dan ingin berpartisipasi mengembangkan industri ini. Saya juga sempat mau keluar, tapi ditarik lagi. Akhirnya, di tahun 2013, lalu, perusahaan ini pun berjalan," tutur Irawan, saat

dijumpai di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Dari perjalanan karir Irawan yang cukup panjang itu, tak heran jika dirinya cukup mumpuni di bidang perdagangan berjangka. Teori maupun praktik tentang perdagangan berjangka agaknya sudah cukup dikuasainya. Tak salah, dirinya juga kerap diminta mengisi *training* ataupun beberapa pelatihan. Bahkan, dirinya pernah memberi pelatihan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil- PPNS Bappebti. "Bukan mengajar, tapi mungkin lebih cocok disebut diskusi saja 'lah,' ucapnya merendah.

Menurut ayah dari tiga putra ini, cikal bakal dirinya menjadi seorang *trainer* terbentuk saat dia menjadi seorang pengurus di Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia- APBI. "Saat itu, APBI memang sering menyelenggarakan pelatihan. Dan

saya ditunjuk untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman," ujarnya.

Tak berpuas diri atas hasil yang diraihinya, Irawan Tjindana justru merasa masih harus banyak belajar lagi mengenai perdagangan berjangka. Bagi Pria kelahiran Belitung, tahun 1969 ini, mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Dia bilang, dirinya ingin suatu saat bisa mendapatkan kesempatan magang di perusahaan pialang ataupun bursa berjangka di luar negeri.

"Saya ingin magang tapi untuk pekerjaan yang bersifat manajerial, jadi tidak menimbulkan risiko kerugian," ungkapnya.

Dari kesempatan magang tersebut, dia berharap dapat memperluas cakrawala pengetahuan. "Saya ingin merasakan bagaimana 'sih kalau ada kontrak baru yang diluncurkan oleh bursa luar negeri," kata pria berdarah Tionghoa ini.

Keinginannya itu, bukan berarti dia tidak pernah mengamati industri PBK di luar negeri. Dia pernah mengunjungi beberapa negara seperti Tiongkok, Singapura dan Malaysia. Mungkin saja, dengan magang akan lebih banyak memberi kesempatan dirinya untuk menggali ilmu PBK dari belahan dunia lain.

Kontrak Gulir

Di bawah nakhoda Irawan Tjindana, PT HII terus berupaya keras mengembangkan usahanya. Perusahaan ini merupakan perusahaan pedagang yang menyelenggarakan transaksi bilateral yang dikenal dengan Sistem Perdagangan Alternatif- SPA dan juga untuk kontrak multilateral.

Saat ini, PT HII merupakan *member* dari JFX, dan aktif bertransaksi kontrak gulir emas. "Sebelumnya kami aktif bertransaksi kakao, tapi sekarang beralih ke kontrak emas," terangnya.

Irawan berpendapat, satu produk saja sudah cukup bagus jika kontrak tersebut dapat likuid. "Karenanya, kami akan terus partisipasi aktif di kontrak multilateral."

Sedangkan untuk kontrak bilateral, PT HII saat ini baru memiliki satu perusahaan pialang yang menjadi mitra dari transaksinya. Karena itu, dia bertekad akan terus berusaha agar *member* PT HII bertambah banyak. "Sekarang kami masih terus mencari *member*," imbuhnya.

Peluang Bisnis

Sebelum terjun ke dunia PBK, sarjana di bidang Teknik Informatika lulusan Universitas Budi Luhur, Jakarta, ini, sudah cukup lama berkecimpung di dunia perbankan. Dia bekerja sebagai IT di salah satu bank swasta. Lalu, dalam perjalanan karirnya, Irawan justru menyeberang ke industri PBK. Apa pasalnya?

Bagi Irawan, komoditas kontrak berjangka bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Produknya bisa mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Berbeda dengan perdagangan saham yang jenis produknya berbeda-beda di masing-masing negara. "Kalau komoditas itu bersifat global. Misalnya produk CPO yang ada di Indonesia, kalau diperdagangkan di bursa tentunya akan sama bentuk produknya di Amerika atau di benua Eropa," ujarnya.

Dia juga tertarik dengan perdagangan produk bilateral. Meskipun dia bilang, "kalau forex, ya itu-itu saja tidak berkembang." Tapi, dia tak membantah perdagangan bilateral juga menjanjikan keuntungan. Karena itu, dia menyimpulkan, produk bilateral maupun multilateral hendaknya dapat berjalan beriringan.

"Kalau hanya SPA saja, berarti tidak mendukung amanat undang-undang. Tapi, kalau hanya multilateral saja, kita juga bisa bilang munafik. Jadi, dua-duanya harus bisa jalan," tegasnya.

Dari ketertarikannya itu, Irawan ingin terus berkembang dengan industri PBK. Meskipun tentunya pada suatu saat



dirinya harus pensiun karena keterbatasan usia.

"Kalau sudah pensiun, saya mau fokus di usaha kuliner," kata pria yang hobi masak ini.

Rupanya, bisnis kuliner bagi Irawan Tjindana bukan sebatas wacana. Saat ini, dirinya justru telah membuka usaha kuliner dengan menu khas Belitung di BSD Tangerang. "Menunya ada mie Belitung dan nasi tim ayam. Saat ini yang menjalankan usaha itu adalah istri saya. Tapi kalau ada waktu luang, saya juga ikut terjun membantu memasak," katanya.

Sebenarnya, untuk berbisnis kuliner bagi Irawan bukanlah hal yang baru. Dia mengatakan, sudah 40 tahun orang tuanya menggeluti usaha kuliner perpaduan masakan Melayu, Nusantara dan oriental di daerah Belitung. "Di sana sudah ada ada 3 outlet," katanya. Jadi jangan heran, jika Irawan Tjindana ternyata cukup piawai membedah dan membuat berbagai menu-menu masakan.



Sistem Resi Gudang

**STABILITAS HARGA
&
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI**